

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, benar dan tepat merupakan kebutuhan utama bagi setiap organisasi dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya [1]. Demikian juga institusi pemerintah, merupakan organisasi yang dalam melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari akan menghasilkan berbagai macam jenis data. Oleh sebab itu, institusi pemerintah membutuhkan data yang tersusun dengan baik, yang berguna untuk membantu para pimpinan/pengambil kebijakan dalam melaksanakan rencana kegiatan serta melakukan proses pengambilan keputusan.

Institusi pemerintah didefinisikan sebagai organisasi/lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan, dimana tugas dan fungsinya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yaitu, melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan, kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat [2]. Menurut Perpres nomor 28 tahun 2015, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara dan membidangi urusan keuangan dan kekayaan Negara. Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta membawahi 11 unit eselon 1 yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah tugas dan fungsi utama dari Kementerian Keuangan:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan Negara, perimbangan keuangan dan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
2. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

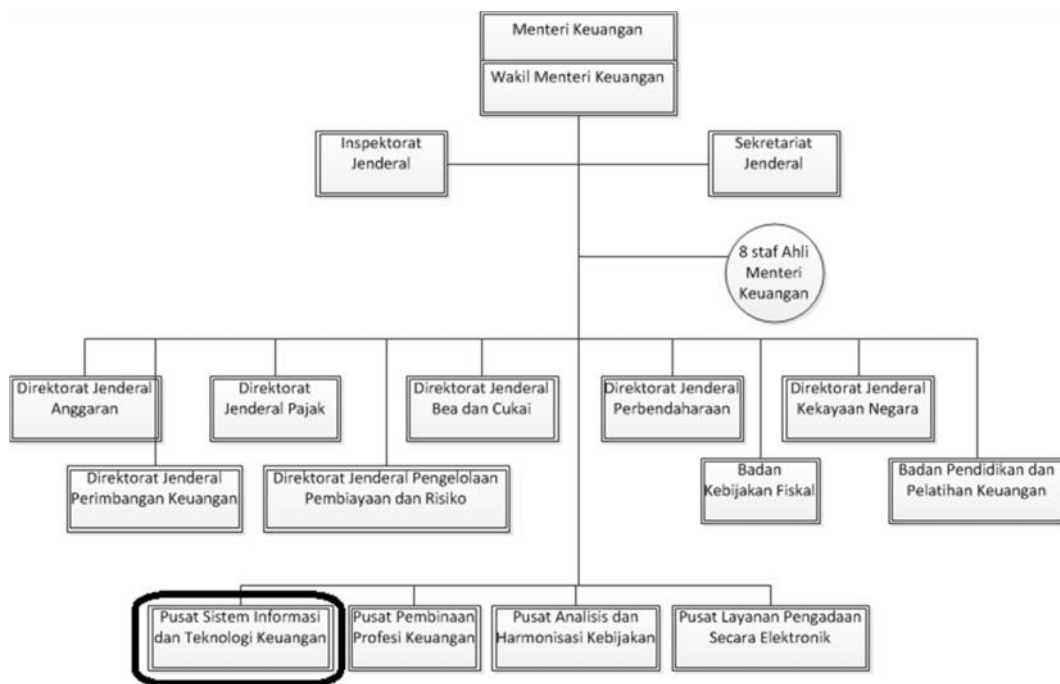
Ketiga fungsi yang dijabarkan tersebut menunjukkan pentingnya tugas dan fungsi Menteri Keuangan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis terkait keuangan dan kekayaan Negara. Oleh sebab itu, untuk mendukung tugas dan fungsi Menteri Keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan strategis, dibutuhkan data dan informasi yang terpadu, dengan ketersediaan dan integritas data yang tinggi serta akurat. Sehingga memungkinkan Menteri Keuangan melakukan praktik pengambilan keputusan yang efektif.

Data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan Menteri Keuangan disediakan oleh pimpinan masing-masing unit eselon 1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, penyampaian data dan informasi dalam bentuk laporan dilakukan oleh masing-masing unit eselon 1 secara terpisah dengan format yang berbeda-beda. Hal ini dapat memicu inkonsistensi data, kesulitan dalam melakukan agregasi dan analisis data, bahkan dapat membuat kualitas data menurun. Kualitas data yang tidak baik dapat berakibat pada kurang efektifnya keputusan yang diambil. Menyadari hal tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang TIK yang bertugas sebagai CIO kemudian memiliki inisiatif untuk membangun sistem *Business Intelligence* (BI) bagi Kementerian Keuangan pada tahun 2006. Hal ini dikarenakan, sistem *Business Intelligence* merupakan solusi bagi organisasi dalam mengolah dan memanfaatkan data yang mereka miliki untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat sasaran [3].

*Business Intelligence* (BI) didefinisikan sebagai sekumpulan kemampuan, produk, proses, teknologi, aplikasi serta praktek untuk mendukung suatu organisasi/institusi dalam membuat keputusan yang lebih baik, efektif dan efisien. Jadi, *Business Intelligence* lebih tepat disebut sebagai sebuah arsitektur yang terintegrasi dengan aplikasi pengambil keputusan [4][5][6]. *Business Intelligence* membantu organisasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi seluruh proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data *real-time* dan akurat, sehingga masalah yang ada pada organisasi dapat segera diselesaikan sebelum

menimbulkan masalah lain yang lebih besar. *Business Intelligence* menyediakan kemampuan untuk menggali data, membersihkan dan menggabungkan data dari berbagai sistem informasi operasional kedalam *datamart* atau *datawarehouse enterprise* [7]. Dari waktu ke waktu peran *Business Intelligence* dan dampak dari penggunaan *Business Intelligence* terus mengalami evolusi. Peran *Business Intelligence* pada mulanya hanya dipandang sebagai sebuah aplikasi analitis, namun saat ini *Business Intelligence* telah dianggap sebagai bagian penting dari kemampuan strategis organisasi. Selain itu, *Business Intelligence* yang pada mulanya merupakan salah satu prioritas teknologi, kini menjadi salah satu prioritas bisnis utama bagi organisasi [8].

CIO Kementerian Keuangan menunjuk Unit TIK Pusat sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pembangunan sistem *Business Intelligence* Kementerian. Sesuai dengan KMK Nomor 338/KMK.01/2012 [9], Unit TIK Pusat dilaksanakan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) sampai dengan ditetapkannya unit TIK pusat Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan. Pusintek merupakan unit eselon 2 yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal. Posisi Pusintek dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.1. Struktur unit Pusintek diketuai oleh *Chief Information Officer* (CIO), yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa memperhatikan masukan dari Komite Pengarah TIK, hal ini sesuai dengan KMK Nomor 260/KMK.01/2009 [10]. Berdasarkan tugas dan fungsi yang tercantum di dalam PMK Nomor 234/PMK.01/2015 Bab XV [11], Pusintek dapat dikategorikan sebagai koordinator sekaligus pelaksana TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, proses penentuan struktur, peran dan tanggung jawab unit TIK Pusat didefinisikan di tingkat unit TIK Pusat yaitu Pusintek, serta menjadi acuan dari pembentukan/penyesuaian unit TIK Eselon 1 yang lain, hal ini sesuai dengan KMK Nomor 260/KMK.01/2009 [10]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis terkait sistem *Business Intelligence* di Pusintek dipandang mampu mewakili pelaksanaan proses bisnis terkait sistem *Business Intelligence* di seluruh Kementerian Keuangan.



Gambar 1.1 Struktur organisasi Kemenkeu

Sumber: Diambil dari PMK Nomor 234/PMK.01/2015

Sebagai unit TIK Pusat Kementerian, Pusintek ditunjuk untuk menginisiasi pengembangan *Business Intelligence* level *Enterprise* di Kementerian Keuangan pada tahun 2006 yang bernama SISKOLAB, namun pada tahun 2009 SISKOLAB dinyatakan gagal dan tidak pernah dipergunakan lagi. Kemudian pada tahun 2010 dibangun sebuah sistem yang hanya berfungsi untuk melayani pertukaran data bagi seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan, sistem ini bernama *Data Interchange*. Sistem *Data Interchange* berhasil dan masih dipergunakan hingga saat ini. Kemudian pada pertengahan tahun 2014, CIO Kementerian Keuangan menginisiasi pembangunan *Business Intelligence* level *Enterprise* yang berfungsi untuk *pooling* data-data laporan dari seluruh unit eselon 1 kepada Menteri Keuangan, serta sebagai sistem penyedia data utama dan yang paling benar bagi seluruh unit eselon 1 di Kementerian Keuangan atau dikenal dengan istilah *single source of truth*. Sistem *Business Intelligence* ini diberi nama Sistem Layanan Data Keuangan (SLDK). Pembangunan SLDK telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan direncanakan selesai dibangun pada tahun 2018.

PUSINTEK	1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan yang Terintegrasi							
	2a-N Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-15	Pol/ KP
Target	91%	93%	93%	95%	95%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	-	93%	93%	95%	95%	99%	99%	
Capaian	-	100%	100%	100%	100%	99%	99%	

Penjelasan IKU	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Integrasi TIK adalah kegiatan konsolidasi infrastruktur TIK, dan sistem informasi Unit Eselon I pada DC dan DRC Kementerian Keuangan. Target integrasi TIK Kemenkeu adalah: - Tahun 2011 : 40% - Tahun 2012 : 60% - Tahun 2013 : 80% - Tahun 2014 : 90% - Tahun 2015 : 100% Proses/kegiatan Integrasi TIK Kementerian Keuangan Tahun 2015 meliputi: 1. Pembangunan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan, yang terdiri dari: a. Identifikasi kebutuhan reporting seluruh unit Eselon I b. Perancangan sistem layanan data Kementerian Keuangan c. Implementasi sistem layanan data Kementerian Keuangan (Piloting) 2. Integrasi Service Desk Kemenkeu, yang terdiri dari: a. Arsitektur Integrasi Service Desk Kemenkeu b. Pengembangan Teknologi Integrasi Service Desk (untuk masa Transisi) c. Skema Pengelolaan dan Operasional Service Desk Terintegrasi d. SOP Link integrasi service desk (MPN-G2/CEISA)	1. Proses lelang Pengembangan SLDK gagal, Nota dinas hasil lelang : ND-70/SJ.7.2/2015; 2. Telah disusun dokumen Perancangan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan, telah dilaporkan dengan Nota Dinas Nomor ND-400/IT.3/2015;

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
1. Pembangunan SLDK: a. Implementasi SLDK untuk 5 unit eselon I dilakukan pada tahun 2016 b. Dilanjutkan dengan operasional dan Pengelolaan SLDK	1. Bidang PSI dan Bidang MLD	2016

Gambar 1.2 LCK IKU Integrasi TIK Kemenkeu 2015  
 Sumber: Diambil dari Laporan Capaian Kinerja Pusintek Periode Triwulan IV Tahun 2015

Faktanya, perencanaan dan pengembangan proyek *Business Intelligence* di dalam suatu organisasi membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan melibatkan hampir seluruh *stakeholder* di dalam organisasi serta memerlukan waktu yang cukup lama [12]. Demikian juga dengan pembangunan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan, berdasarkan dokumen KAK perangkat *Analytics Platform System* (APS) dan KAK Jasa Konsultansi Pembangunan Sistem Layanan Data Keuangan (SLDK) dapat diperoleh informasi bahwa pembangunan ini telah menggunakan anggaran Negara sebesar ± Rp. 23,5 Milyar. Sedangkan berdasarkan data pada dokumen Rancangan Sistem Layanan Data Keuangan, dokumen Kontrak Kinerja (KK) no 9/SJ/2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) Integrasi no 2a-N dan KK no 9/SJ/2016 IKU 1a-N, dapat diketahui bahwa inisiatif implementasi *Business Intelligence* telah dimulai sejak pertengahan tahun 2014, hingga saat ini telah memakan waktu selama 3 tahun serta melibatkan empat unit eselon 3 di Pusintek sebagai tim pengembang sistem.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa institusi telah menyadari sistem *Business Intelligence* sebagai bagian penting dari kemampuan strategis dalam proses pengambilan keputusan, namun institusi belum menyadari bahwa pembangunan *Business Intelligence* memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi. Sekitar 60% dari pengembangan proyek *Business Intelligence* gagal atau ditinggalkan karena perencanaan yang kurang matang, tahapan yang keliru, tenggat waktu yang salah, proses manajemen proyek yang buruk, kebutuhan bisnis yang tidak terdefinisi dengan jelas atau kualitas informasi yang dihasilkan tidak baik [12]. Lupu et.al dalam papernya melaporkan, 60%-70% implementasi *Business Intelligence* gagal karena masalah yang berhubungan dengan teknologi, organisasi, kultur dan infrastruktur [13]. Ditambah lagi, EMC Corporation menyatakan bahwa beberapa inisiatif *Business Intelligence* gagal karena *tools* yang tidak mudah diakses oleh *end users* serta data yang dihasilkan oleh sistem tidak sesuai dengan kebutuhan *user*. Dalam sebuah artikel majalah teknologi informasi digital bernama Computerworld, juga mengungkapkan beberapa penyebab kegagalan implementasi proyek *Business Intelligence* antara lain ketidakmampuan organisasi mengenali *Business Intelligence* sebagai inisiatif bisnis utama, para sponsor bisnis yang tidak terikat, kurangnya dukungan pimpinan, kurangnya staff yang terampil, tidak adanya aktifitas analisis bisnis, tidak adanya kepedulian tentang dampak dari data yang kotor terhadap keuntungan bisnis dan tidak adanya kebutuhan terhadap metadata. [14]

Pengembangan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan saat ini terindikasi mengalami keterlambatan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini diketahui berdasarkan data dari dokumen manual IKU Integrasi tahun 2015 no 2a-N, yang menargetkan 3 tahapan pengembangan *Business Intelligence* telah dilakukan pada kuartal II antara lain: identifikasi kebutuhan *reporting* seluruh unit Eselon I, perancangan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dan implementasi SLDK (*Piloting*). Namun, capaian yang tercantum dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) IKU Integrasi Pusintek no 2a-N tahun 2015 menyatakan bahwa, dari ketiga tahapan tersebut hanya dapat terlaksana tahapan 1 dan 2 sedangkan tahap 3 yaitu implementasi SLDK (*piloting*) tidak dapat terlaksana,

laporan ini diperlihatkan pada Gambar 1.2. Dari dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *Business Intelligence* Kemenkeu di tahun 2015 mengalami kegagalan. Tahun 2016, dokumen manual IKU Integrasi no 1a-N mencantumkan tahap yang harus dilakukan pada kuartal I dan II antara lain penyediaan perangkat TIK dan *data modelling*. Sedangkan pada kuartal III dan IV, tahapan yang harus dilaksanakan antara lain implementasi pada 5 unit eselon I, serta operasional dan pengelolaan layanan. Hasil capaian yang diperoleh berdasarkan Laporan Capaian Kinerja (LCK) IKU Integrasi Pusintek no 1a-N tahun 2016 semester I yang diperlihatkan pada Gambar 1.3 diketahui bahwa, kedua tahap yang ditargetkan telah tercapai. Saat ini pelaksanaan pengembangan *Business Intelligence* telah memasuki tahap 3 yaitu implementasi pada 5 unit eselon 1, namun *progress* yang diperoleh dari tim pengembang melaporkan bahwa, pada bulan juli proses implementasi *Business Intelligence* level *Enterprise* belum dilaksanakan dan masih dalam tahap lelang. Dari dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *Business Intelligence* Kemenkeu di tahun 2016 mengalami keterlambatan.

Jika keterlambatan implementasi sistem *Business Intelligence* tersebut tidak segera diatasi, maka pembangunan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan dapat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut akan mengakibatkan berbagai macam dampak antara lain, sejumlah besar sumber daya dan waktu yang telah dialokasikan menjadi sia-sia, pemegang kuasa pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan kegagalan penggunaan dana tersebut kepada auditor internal dan eksternal. Ditambah lagi, institusi tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari penggunaan *Business Intelligence*. Oleh sebab itu, diperlukan adanya solusi dalam mengurangi tingginya tingkat kegagalan pembangunan sistem *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa pengukuran tingkat kematangan sistem *Business Intelligence* dan identifikasi *Critical Success Factors* dipandang sebagai beberapa solusi yang dapat diambil dalam meminimalisir kegagalan pembangunan sistem *Business Intelligence*.

Istilah kematangan (*maturity*) digambarkan sebagai suatu fase yang lengkap, sempurna dan siap. Untuk mencapai fase kematangan tersebut sebuah langkah perubahan yang evolusioner dari fase awal ke fase yang diinginkan harus segera dilakukan oleh sebuah organisasi [8]. Pengukuran tingkat kematangan *Business Intelligence* dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja *Business Intelligence Maturity Model*. Model kematangan tersebut akan menjadi pedoman dan menyediakan langkah-langkah pengukuran kematangan dan kesiapan *stakeholder* dalam mengimplementasikan *Business Intelligence* [14]. Dengan mengetahui tingkat kematangan *Business Intelligence*, organisasi diharapkan dapat mengetahui kondisi terkini pengembangan *Business Intelligence* yang telah mereka lakukan sehingga mampu memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai dari inisiatif penggunaan *Business Intelligence* [3].

PUSINTEK	1. Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi yang Andal							
	1a-N Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-15	Pol/ KP
Target	-	20%	20%	-	20%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	-	20%	20%					
Capaian	-	100%	100%					

Isu Utama dan Implikasi	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
<b>Penjelasan Capaian:</b> Target integrasi TIK sampai dengan semester I adalah kegiatan Pembangunan Sistem Layanan Data Kemenkeu tahap 2, yang meliputi: 1. Penyediaan perangkat SLDK, telah selesai dilaksanakan dan telah diimplementasikan di DC dan DRC; 2. Melakukan penyusunan <i>data modelling</i> dengan sumber data SPAN	1. Pembangunan SLDK: a. Pengembangan <i>datawarehouse</i> dan <i>dashboard</i> Pimpinan b. Implementasi SLDK untuk 5 unit eselon I c. Operasional dan Pengelolaan SLDK  2. Fungsionalitas DC/DRC untuk aplikasi kritikal a. Menyusun DRP aplikasi Kritikal b. Penyediaan Infrastruktur pada DC/DRC c. Uji Fungsionalitas DC/DRC untuk aplikasi Kritikal	1. Bidang PSI dan Bidang MLD          2. Bidang KIKTIK dan Bidang PKTIK	Semester II
<b>Tindakan yang Telah Dilaksanakan</b> 1. Telah dilakukan penyusunan <i>data modelling</i> dengan sumber data SPAN, meliputi: a. Realisasi Bendahara Umum Negara (BUN) (DJPEN) b. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja; Realisasi PNPB (DJA) c. Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai (Akun 412 dan 4115) (DJBC) d. Realisasi Belanja Modal untuk penambahan Aset (DJKN) e. Realisasi BA 15 Kementerian Keuangan (SETJEN) 2. Telah dilaksanakan persiapan uji fungsionalitas DC/DRC, meliputi a. Melakukan pembahasan peningkatan kapasitas infrastruktur DC/DRC b. Persiapan pelaksanaan DRC Drill antara lain MPN G2 c. Melakukan re konfigurasi perangkat jaringan di DC/DRC			

Gambar 1.3 LCK IKU Integrasi TIK Kemenkeu 2016  
 Sumber: Diambil dari Laporan Capaian Kinerja Pusintek Periode Triwulan II Tahun 2016



Agar proses bisnis didalam suatu organisasi atau sistem dapat terselenggara dengan baik, diperlukan kinerja optimal pada area-area tertentu didalamnya. Area tersebut menjadi bagian penting dari kesuksesan terselenggaranya suatu sistem atau organisasi, oleh sebab itu area-area tersebut dinamakan *Critical Success Factor* (CSF) [15]. Yang perlu diperhatikan adalah, area-area tersebut tidak terukur. Organisasi menggunakan CSF untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting pendukung kesuksesan implementasi dari proyek *Business Intelligence* yang dikembangkan.

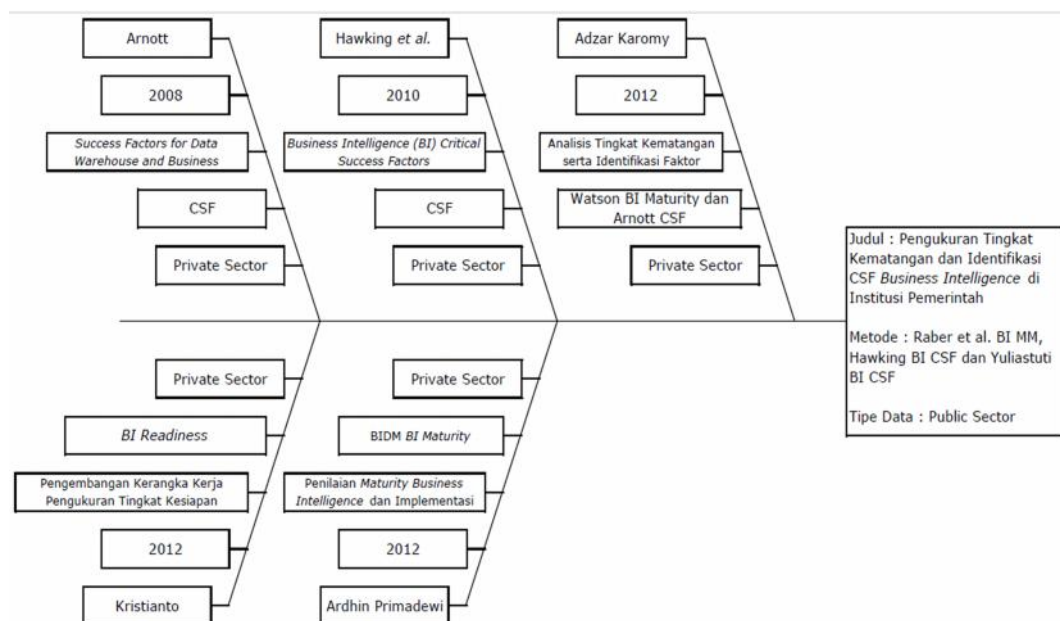
## **1.2. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, diketahui bahwa inisiasi pembangunan sistem *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan telah menggunakan sumber daya yang sangat besar dan terindikasi mengalami keterlambatan, jika hal ini tidak segera diatasi, maka pengembangan *Business Intelligence* tersebut terancam mengalami kegagalan. Sehingga, perlu dirumuskan strategi yang efektif dalam mengurangi risiko kegagalan pengembangan *Business Intelligence* dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan dan identifikasi *Critical Success Factors* dari pembangunan sistem *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan.

## **1.3. Keaslian penelitian**

Penelitian mengenai solusi praktis yang dapat diambil dalam mencegah kegagalan proses pembangunan dan pengembangan *Business Intelligence* di organisasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Arnott pada tahun 2008 [16] yang mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan/*Critical Success Factor* (CSF) pada sistem informasi eksekutif/*Executive Information System* (EIS), DW dan *Business Intelligence*. Identifikasi CSF juga dilakukan oleh Hawking et. al, tahun 2010 [17] pada ERP yang dimiliki perusahaan-perusahaan di USA dan Australia. Karomy (2012) [3] juga melakukan identifikasi CSF serta ditambah dengan kegiatan pengukuran tingkat kematangan *Business Intelligence* pada PT. Telkom, Tbk. Penelitian yang dilakukan Kristianto tahun 2012 [18],

melakukan pengukuran tingkat kesiapan implementasi *Business Intelligence* pada UMKM sebagai salah satu solusi yang dapat diambil dalam mencegah kegagalan implementasi *Business Intelligence*. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Primadewi pada tahun yang sama, melakukan penilaian tingkat kematangan implementasi *Business Intelligence* dan OLAP pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Gambar 1.4 Diagram *Fishbone* Penelitian  
Sumber: Dikembangkan sendiri untuk penelitian ini

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini penulis berusaha memberikan solusi terhadap ancaman kegagalan implementasi *Business Intelligence* di institusi pemerintah dengan cara melakukan pengukuran spesifik atau evaluasi terkait praktik-praktik pengembangan *Business Intelligence* di institusi pemerintah dengan menggunakan metode Raber et al. *Business Intelligence maturity model* serta menentukan *Critical Success Factor* (CSF) menggunakan Hawking CSF *Business Intelligence* dan Yuliasuti CSF *Business Intelligence* yang mempengaruhi kesuksesan implementasi *Business Intelligence*.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara institusi pemerintah dan swasta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hal ini mempengaruhi bagaimana kedua tipe organisasi tersebut mengelola proyek TI mereka [19]–[21]. Perbedaan tersebut dijadikan pertimbangan oleh penulis dalam memilih model pengukuran kematangan dan CSF yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini menghasilkan pengetahuan mengenai kondisi terkini pengembangan *Business Intelligence* sehingga perumusan strategi dalam meningkatkan kematangan *Business Intelligence* di Kemenkeu dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang valid.

#### **1.4. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini mengasumsikan keterlambatan pembangunan *Business Intelligence* Kementerian Keuangan disebabkan karena kurang matangnya sistem dan adanya faktor-faktor penghambat proses pembangunan sistem *Business Intelligence*.
- 2) Penelitian ini membahas mengenai sistem *Business Intelligence* level *Enterprise* pada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Kementerian Keuangan.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji tingkat kematangan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan berdasarkan Raber *et al. Maturity Model*.
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan.
- 3) Memberikan rekomendasi rumusan strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kematangan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan.

## 1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hasil penelitian berupa analisis tingkat kematangan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi terkait kondisi terkini pengembangan *Business Intelligence*, sehingga nantinya Kementerian Keuangan mampu merumuskan strategi berdasarkan hasil evaluasi yang valid.
- 2) Hasil penelitian berupa analisis tingkat kematangan *Business Intelligence* diharapkan dapat meminimalisir kegagalan organisasi dalam mengimplementasikan *Business Intelligence* sebagai *single source of truth* di Kementerian Keuangan.
- 3) Hasil penelitian juga diharapkan dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai dari inisiatif penggunaan *Business Intelligence*.
- 4) Hasil penelitian berupa rumusan strategi diharapkan mampu menjadi bahan kajian dalam melakukan perumusan strategi yang optimal untuk meningkatkan kematangan *Business Intelligence* di Kementerian Keuangan.